

## **BAB III**

### **OPERASIONAL PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP) DI DESA KEDUNGTURI KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO**

#### **A. Gambaran Umum Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)**

##### **1. Latar Belakang Adanya Program P2KP**

Perekonomian Indonesia pada awalnya telah mengalami perubahan baik dilihat dari distribusi tingkat pendapatan maupun sistem kelembagaan. Globalisasi ekonomi telah memperluas jangkauan masyarakat untuk mengenal sistem ekonomi secara bebas dan juga memungkinkan barang dan jasa bergerak dengan lebih cepat dengan kualitas yang lebih baik.

Dengan keberhasilan ekonomi tersebut, memberikan manfaat yang lebih besar bagi kehidupan masyarakat dalam satu sisi, tetapi juga memberikan konsekuensi besar terhadap masyarakat yang kehidupan ekonominya terpuruk lebih-lebih mereka yang berada dalam kategori masyarakat miskin.

Kalau kita melihat dari latar belakang adanya program P2KP kita tidak dapat melupakan kondisi ekonomi bangsa Indonesia di atas secara general. Kehidupan ekonomi bangsa Indonesia mengalami keterpurukan sejak tahun 1997 yang ditandai dengan krisis moneter dan musim kemarau yang

berkepanjangan sehingga merambat kepada krisis ekonomi global. Kedua permasalahan tersebut telah menyebabkan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat yang berupa terganggunya kegiatan produksi, distribusi dan ekonomi. Selanjutnya permasalahan tersebut telah membawa dampak pada peningkatan pengangguran dan jumlah penduduk miskin baik di daerah perkotaan maupun di desa.

Permasalahan yang paling mendasar dari rakyat Indonesia sejak dahulu adalah kemiskinan, dimana kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai oleh pengangguran dan keterbelakangan yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan.

Kemiskinan di Indonesia merupakan masalah pembangunan yang multidimensi sehingga cara pemecahannya diperlukan suatu strategi komprehensif terpadu dan terarah serta berkesinambungan. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini Departemen Pekerjaan Umum telah merancang suatu program untuk menanggulangi kemiskinan yang ada di perkotaan yaitu Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Namun patut disadari bahwa program penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan oleh pemerintah masih belum mampu mengatasi seluruh persoalan kemiskinan ditingkat masyarakat baik sebagai kelompok sasaran maupun dalam pengertian masyarakat warga secara keseluruhan. Hal ini antara lain disebabkan karena dalam program dimaksud kurang mendapat perhatian yang memadai dari sisi konsep. Oleh karena itu, Departemen Pekerjaan Umum

telah merancang suatu program yang diharapkan dapat menjamin keberlanjutan upaya-upaya dalam penguatan kelembagaan dan kapasitas masyarakat yang mengutamakan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan institusi lokal.

P2KP adalah suatu program yang dirancang dengan suatu paradigma baru bahwa untuk menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan diperlukan suatu pendekatan yang berbasis pada prinsip-prinsip pemberdayaan komunitas sehingga dalam proses pelaksanaan program perlu dilakukan upaya-upaya tertentu yang harus dilakukan oleh komunitas itu sendiri dengan sasaran utama adalah masyarakat miskin ditingkat kelurahan di perkotaan. Sifat dan konsep dasar P2KP berbeda dengan program lainnya, seperti program IDT, Inpres, KSD, UED dan lain-lain. P2KP adalah program yang mengutamakan pada pengokohan/ penguatan kelembagaan di masyarakat agar program ini berkelanjutan. Dalam hal ini, masyarakat diperankan sebagai pelaku utama melalui partisipasi aktifnya sehingga masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, tidak hanya difungsikan sebagai obyek program, tetapi ikut serta dalam merumuskan program yang paling cocok bagi mereka melalui proses, perencanaan, pemantauan serta evaluasi hasil dari implementasi program. P2KP bukanlah program yang semata-mata menyalurkan dana ke masyarakat melainkan juga mendorong upaya pemberdayaan masyarakat untuk dapat

berdiri sendiri dalam menyelesaikan berbagai persoalan kemiskinan yang dihadapi.<sup>30</sup>

Mengacu pada realitas dan kondisi riil masyarakat secara umum, maka kondisi kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah yang mendapatkan dana program P2KP, yang salah satu desanya yang mendapatkan dana bantuan program P2KP adalah Desa Kedung Turi.

## 2. Visi dan Misi

Visi : terwujudnya masyarakat mandiri yang berbudaya maju dan sejahtera dalam lingkungan yang sehat, berjati diri dan produktif.

Misi : Membangun masyarakat mandiri yang mampu menjalin kebersamaan dan sinergi dengan pemerintah maupun kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan secara efektif dan mampu mewujudkan terciptanya lingkungan pemukiman yang tertata, sehat, produktif, dan berkelanjutan.

## 3. Nilai-nilai yang Menjiwai Pelaksanaan P2KP

- a. Dapat dipercaya
- b. Ikhlas/ kerelawanan
- c. Kejujuran
- d. Keadilan
- e. Kesetaraan
- f. Kebersamaan dalam keberagaman

---

<sup>30</sup> Modul Pelatihan Dasar PNPM P2KP, h. 1

#### 4. Prinsip-prinsip yang Melandasi P2KP

##### a. Prinsip-prinsip universal kemasyarakatan

- 1) Demokrasi (musyawarah)
- 2) Partisipasi (aktif berperan serta)
- 3) Transparansi (keterbukaan)
- 4) Akuntabilitas (tanggung gugat)
- 5) Desentralisasi (pembagian wewenang)

##### b. Prinsip TRI DAYA

Merupakan aktualisasi dari prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu:

- 1) Perlindungan dan kelestarian lingkungan
- 2) Perlindungan dan pembangunan sosial
- 3) Pengembangan ekonomi.<sup>31</sup>

#### 5. Sasaran Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

Sasaran kegiatan dilakukan dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Desa Kedung Turi menitikberatkan pada kegiatan yang langsung menyentuh kesejahteraan masyarakat secara langsung. Sedangkan untuk jangka panjangnya diharapkan dapat menghapus tantangan nyata yaitu *gap* / kesenjangan antara si miskin dan non miskin.

---

<sup>31</sup> Inersia, *Belajar Bersama Menanggulangi Kemiskinan*, h. 1-2

Secara rinci sasaran kegiatan penanggulangan kemiskinan sebagai berikut:

a. Sasaran bidang lingkungan

- 1) Melakukan pengerasan jalan
- 2) Melakukan pembenahan rumah warga
- 3) Melakukan saluran air (*drainase*)
- 4) Pengadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah
- 5) Penyediaan air bersih
- 6) Pembuatan MCK Umum

b. Sasaran bidang sosial

- 1) Mengadakan pelatihan perbengkelan
- 2) Mengadakan pelatihan menjahit
- 3) Mengadakan pelatihan bordir
- 4) Memberikan bantuan alat belajar bagi anak berprestasi
- 5) Memberikan santunan bagi warga jompo dan lansia
- 6) Memberikan beasiswa bagi anak yatim piatu
- 7) Mengadakan penyuluhan kesehatan
- 8) Mengadakan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis

c. Sasaran bidang ekonomi

- 1) Memberikan pinjaman modal dengan bunga rendah
- 2) Menyediakan lapangan pekerjaan.<sup>32</sup>

6. Strategi Usaha

Dalam setiap operasionalnya setiap program yang direncanakan terlebih dahulu harus diketahui bagaimana program tersebut dilaksanakan serta untuk siapa program tersebut diberikan, sehingga di dalam aplikasinya nanti tidak ada persepsi yang keliru atau salah sasaran.

Sesuai dengan sasaran kegiatan diatas, maka dana bantuan langsung masyarakat (BLM) hanya diberikan kepada masyarakat yaitu seluruh masyarakat kelurahan dengan penerima manfaat langsung adalah keluarga miskin (sesuai dengan kriteria kemiskinan setempat yang disepakati warga).<sup>33</sup>

Dengan adanya dana bantuan program P2KP, seluruh masyarakat miskin yang menjadi sasaran program diharapkan dapat memanfaatkan dana yang diberikannya untuk menanggulangi kemiskinan di daerahnya masing-masing.

Agar sasaran masyarakat miskin dapat dipilih secara tepat, maka pelaksanaan kegiatan dilakukan dan dikelola oleh organisasi masyarakat lokal bersama kelompok masyarakat lainnya dikelola oleh masyarakat lokal

---

<sup>32</sup> PP-PJM Pronangkis BKM Kedung Turi Sejahtera Desa Kedung Turi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo

<sup>33</sup> Wawancara dengan Ibu Endang (Wakil Ketua BKM) Tanggal 26 Februari 2008

bersama kelompok masyarakat yang dalam program P2KP disebut dengan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Adapun sasaran lokasi penerima bantuan program P2KP adalah kecamatan perkotaan, yakni kecamatan dengan jumlah kelurahan lebih banyak dari jumlah desa.<sup>34</sup>

## **B. Proses Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)**

### **1. Bentuk Kegiatan**

Tahap pelaksanaan program P2KP dalam kegiatan bantuan langsung masyarakat melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Sosialisasi awal, melalui serangkaian diseminasi, lokakarya, dan membangun kesadaran kritis dan pelaku kunci (pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil atau para pihak terkait).
- b. Serangkaian rembuk kesiapan masyarakat dan refleksi kemiskinan untuk membangun kesadaran kritis dan tanggung jawab sosial, serta menumbuhkembangkan kembali nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip-prinsip pengaturan / pemerintahan yang baik.
- c. Kegiatan pemetaan swadaya untuk mengenal, memahami dan menggali persoalan kemiskinan yang ada di sekitar lingkungan wilayahnya.

---

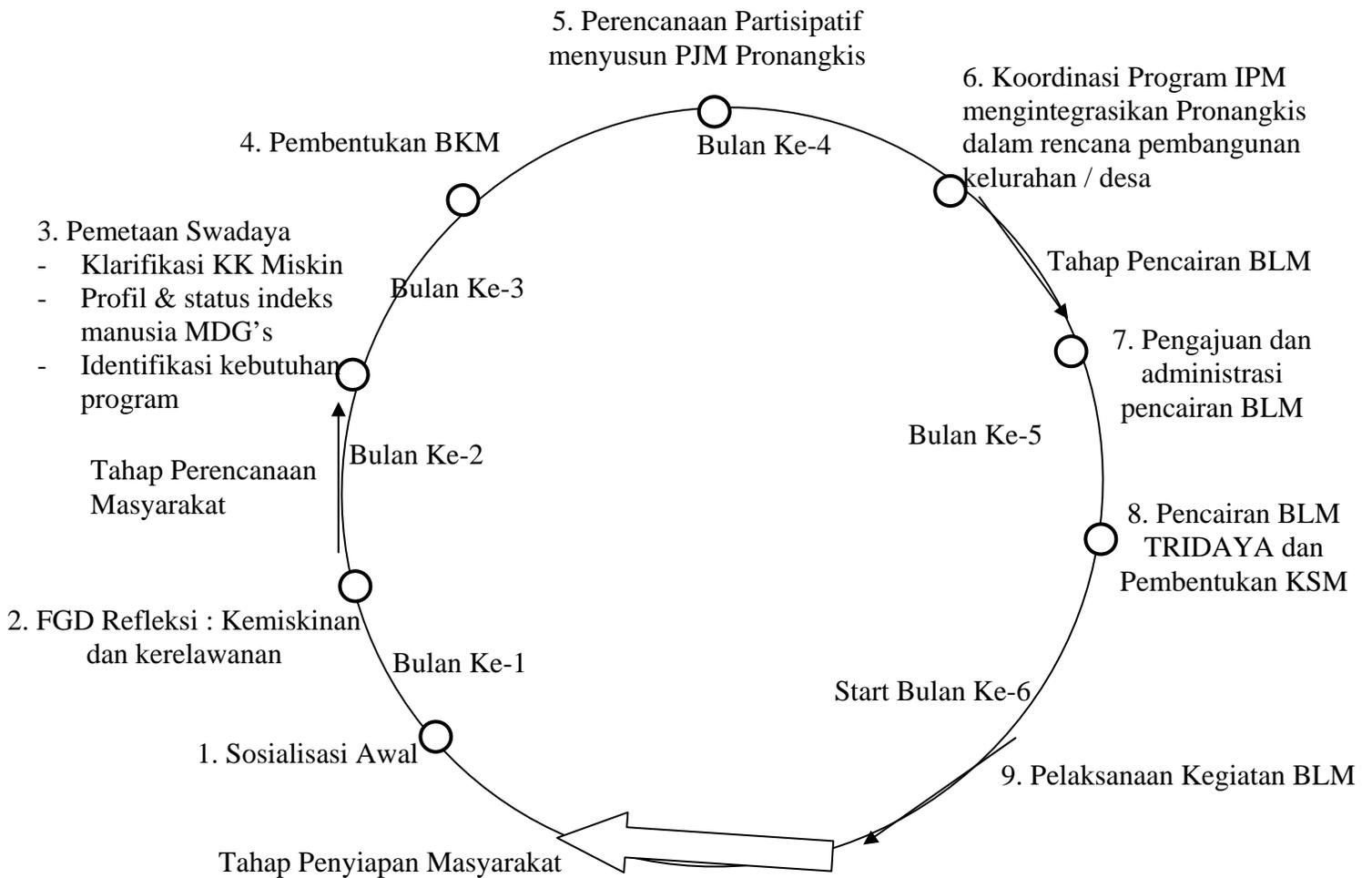
<sup>34</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Kedung Turi Bapak H. Mukarni pada tanggal 3 Maret 2008

- d. Membangun organisasi dan kelembagaan masyarakat (BKM) dengan pembelajaran warga mengenai kepemimpinan yang berbasis nilai, aspiratif dan akuntabel
- e. Perencanaan partisipatif, menyusun PJM Pronangkis berbasis kinerja peningkatan IPM
- f. Koordinasi program IPM, mengintegrasikan Pronangkis dalam rencana pembangunan kelurahan / desa berbasis IPM
- g. Pengajuan dan administrasi BLM
- h. Pencairan BLM TRIDAYA dan pembentukan KSM
- i. Pelaksanaan kegiatan BLM<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> [www.P2KP.co.id](http://www.P2KP.co.id)

**Gambar**  
**Tahapan Kegiatan di Masyarakat Kelurahan (Baru)<sup>36</sup>**



<sup>36</sup> Sumber Konsep Dasar PNPM – P2KP, H. 5

## 2. Proses Pencairan Dana

Tahap pelaksanaan program P2KP dimulai pencairan dana. Seluruh kegiatan dilakukan secara terbuka dan kemajuan pelaksanaannya harus selalu dikoordinasikan dan dievaluasi dalam musyawarah desa atau kelurahan secara rutin.

Penyerahan dana untuk kegiatan yang telah diusulkan dalam proposal diberikan apabila surat perjanjian penyaluran bantuan BLM (SPPB BLM) telah ditandatangani. Proses penyerahan bantuan BLM oleh koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kedung Turi Sejahtera kepada KSM-KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) atau panitia yang usulan kegiatannya disetujui dan dilakukan dalam musyawarah desa. Dalam musyawarah ini juga dijelaskan aturan yang telah disepakati dalam penyaluran dana bantuan langsung masyarakat, dan setelah itu KSM atau panitia akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan usulan yang diajukan dan membuat papan nama kegiatan.

Dana bantuan langsung masyarakat ini, langsung ditangani oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dengan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menjamin bahwa anggota KSM atau Panitia adalah masyarakat miskin dan masyarakat yang berhak mendapat bantuan P2KP, berdasarkan peta kemiskinan yang disusun melalui proses pemetaan swadaya yang dilakukan masyarakat sendiri
- b. Menjamin bahwa usulan-usulan kegiatan yang diajukan, dinilai kelayakan oleh UPL, UPS dan UPK. Kemudian disetujui BKM adalah merupakan

kegiatan yang didasarkan dari hasil pemetaan swadaya dan perencanaan partisipatif

- c. Menjamin bahwa usulan-usulan kegiatan yang disetujui telah dipilih dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan dalam P2KP maupun kriteria tambahan yang ditetapkan KMW
- d. Menjamin bahwa usulan-usulan kegiatan KSM / panitia telah dinyatakan layak oleh UPK dan hasil penelitian tersebut telah direkomendasi serta ditandatangani oleh KMW
- e. Menjamin jumlah kebutuhan dana seluruh kegiatan, ditambah alokasi dana untuk biaya operasional dan pengendalian BKM, tidak melebihi alokasi dana desa / kelurahan
- f. Menjamin bahwa dana yang akan disalurkan ke masyarakat oleh KSM-KSM / panitia adalah sesuai dengan usulan yang telah diajukan
- g. Mengundang pemeriksa keuangan independen untuk memeriksa laporan keuangan BKM, minimal satu kali satu tahun dengan biaya BKM
- h. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya penyimpangan penggunaan dana oleh BKM, maka BKM wajib mengembalikan dana yang dimaksud. BKM wajib menyimpan catatan dan bukti-bukti pengeluaran terkait dengan P2KP selama jangka waktu 5 tahun
- i. Menyerahkan laporan kemajuan setiap bulan ke PJOK dan KMW
- j. Menjamin bahwa dalam proses pengajuan usulan, penilaian kelayakan, persetujuan usulan, hingga pelaksanaan kegiatan maupun pemeliharaan

kegiatan senantiasa didasarkan pada penerapan prinsip dan nilai P2KP secara konsisten oleh segenap pelaku di tingkat masyarakat, KSM / Panitia, UPL, UPS, UPK, dan BKM

- k. Menjamin bahwa pelaksanaan usulan-usulan kegiatan, terutama pembangunan atau rehabilitasi prasarana lingkungan dan pemukiman, didasarkan pada pedoman pengadaan, pedoman pembebasan lahan dan penampungan serta pedoman lingkungan sebagaimana di atur panduan P2KP dan / atau peraturan perundangan yang berlaku
  - l. Menjamin bahwa pelaksanaan usulan didasarkan padat karya atau dengan cara lain yang membuka peluang kesempatan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat miskin dan penganggur di lokasi kegiatan.<sup>37</sup>
3. Peran, Fungsi Utama, dan Tugas Pokok BKM.
- a. Peran BKM
    - 1) Bertindak sebagai motor penggerak dalam mengali dan melembagakan nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip kemasyarakatan.
    - 2) Menumbuh kembangkan solidaritas sosial dan kepedulian dalam menanggulangi kemiskinan
    - 3) Mengorganisasikan dan sinergi potensi warga.
    - 4) Melembagakan proses pengambilan keputusan yang adil.
    - 5) Agen perubahan dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat.
    - 6) Membangun dan menumbuh kembangkan relawan-relawan warga.

---

<sup>37</sup> Dokumen Pencairan Dana BLM PNPM – P2KP 2007, hal. 12

7) Mengembangkan jaringan dengan pihak luar.

b. Fungsi Utama BKM

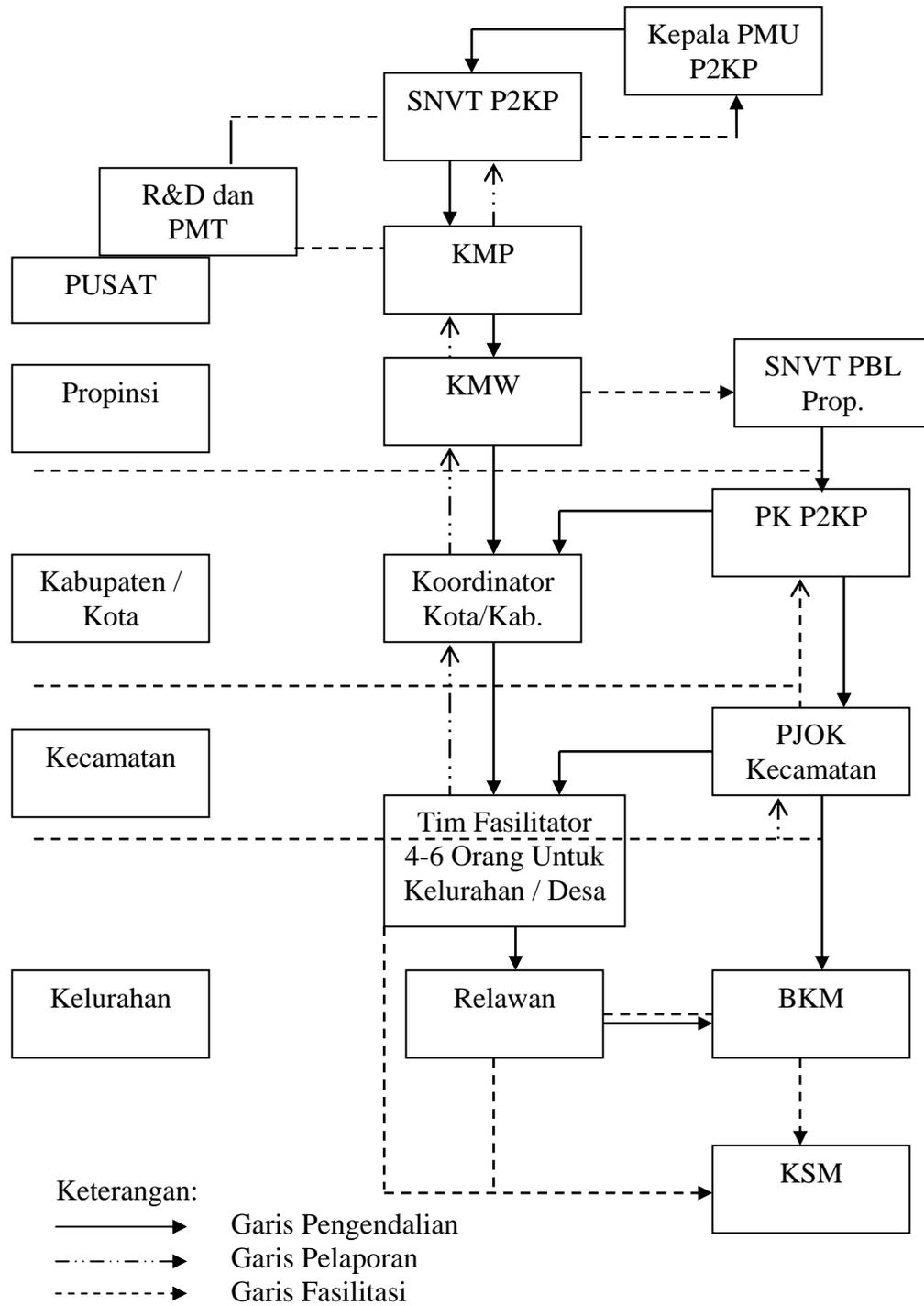
- 1) Sebagai roda penggerak masyarakat warga untuk senantiasa menggali dan melembagakan kembali nilai-nilai luhur kemanusiaan.
- 2) Sebagai penggalang solidaritas dan kesatuan sosial warga untuk membangun gerakan kepedulian dan kebersamaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan.
- 3) Mengorganisir segenap potensi masyarakat.
- 4) Motor penggerak dan agen perubahan.
- 5) Membudayakan sikap keberpihakan pada masyarakat miskin (propoor).
- 6) Membangun gerakan kepedualian dan relawan-relawan masyarakat.
- 7) Lembaga kepercayaan milik masyarakat.
- 8) Sebagai pusat pembelajaran masyarakat melalui pengembangan komunitas belajar kelurahan.

c. Tugas Pokok BKM

- 1) Menetapkan kebijakan-kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan P2KP khususnya, dan penanggulangan kemiskinan umumnya.
- 2) Menyusun rencana program penanggulangan kemiskinan di wilayahnya berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
- 3) Mengorganisir dan mensinergikan potensi dan kekuatan masyarakat bagi optimalisasi upaya penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.

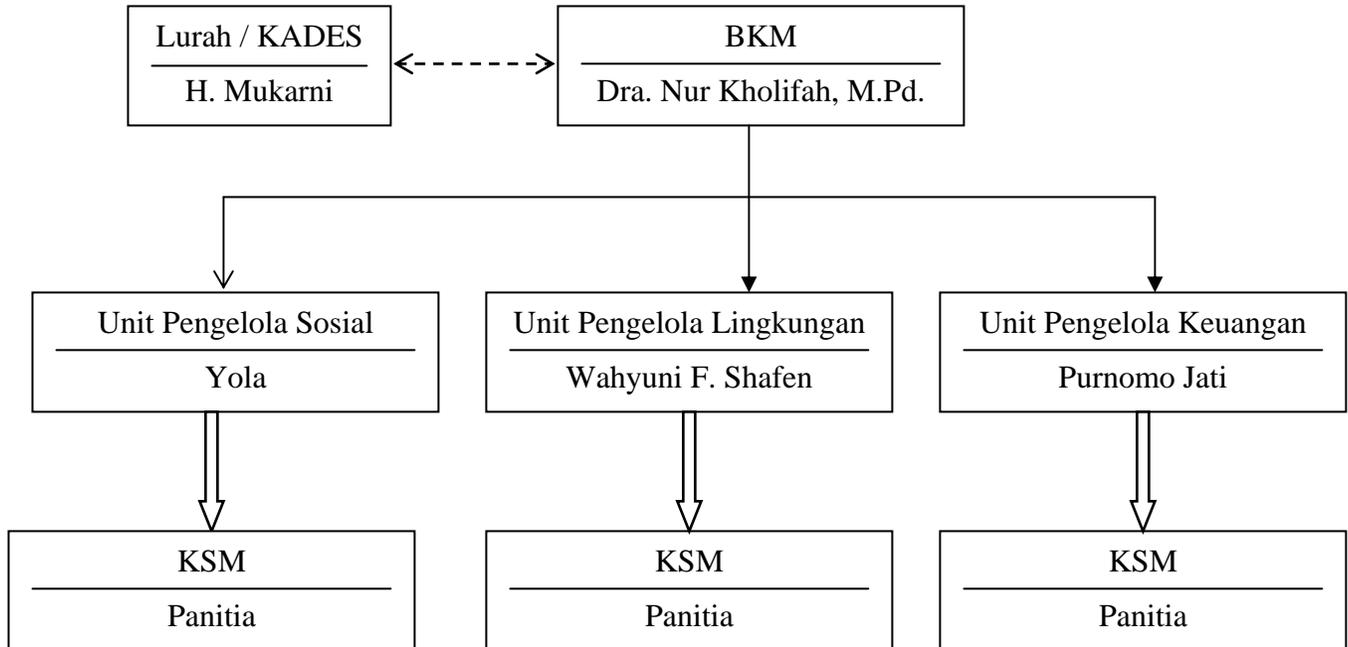
- 4) Melembagakan nilai-nilai universal dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dan kehidupan bermasyarakat di wilayahnya.
- 5) Memonitor pelaksanaan kebijakan dan keputusan yang ditetapkan BKM dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya dan membangun kontrol sosial masyarakat
- 6) Membangun kepercayaan pihak luar untuk dapat menjalin kerjasama dan kemitraan (*Channeling Program*).

**Gambar I**  
**Struktur Organisasi Pengelolaan P2KP<sup>38</sup>**



<sup>38</sup> *Op.cit.*, hal. 5

**Pelaku P2KP di Tingkat Masyarakat di Desa Kedung Turi<sup>39</sup>**



Keterangan :

—————> **Garis Perintah**

=====> **Garis Fasilitasi**

- - - - -> **Garis Koordinasi**

<sup>39</sup> Peran, Tugas Pokok dan Fungsi Pelaku PNPM Mandiri – Perkotaan, h. 6

#### 4. Pemanfaatan Dana

Dana bantuan langsung masyarakat (BLM) P2KP dari pemerintah ke masyarakat melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau panitia setempat diterima oleh koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kedung Turi Sejahtera sebesar Rp. 60.000.000,- merupakan pencairan dana BLM tahap I (20%) untuk program lingkungan. Dana tersebut diberikan kepada tiap-tiap KSM / panitia yang terbentuk yang didasarkan pada hasil pemetaan swadaya, PJM Pronangkis dan Rencana Tahunan Pronangkis, serta kesepakatan diantara semua anggota KSM untuk dijadikan petunjuk bersama diantara anggota yang berupa aturan main KSM dan kesepakatan kegiatan rutin KSM dalam bentuk arisan.

Jumlah KSM / panitia yang terbentuk di Desa Kedungturi sebanyak 8 KSM antara lain:

- a. Panitia / KSM Apel (RW 01)
- b. Panitia / KSM Durian (RW 02)
- c. Panitia / KSM Manggis (RW 04)
- d. Panitia / KSM Mangga (RW 04)
- e. Panitia / KSM Pisang (RW 05)
- f. Panitia / KSM Duku (RW 06)
- g. Panitia / KSM Nanas (RW 08)
- h. Panitia / KSM Jeruk (RW 09)

Untuk jenis kegiatan tiap KSM berbeda-beda, setiap KSM mengajukan proposal usulan pelaksanaan kegiatan yang diajukan melalui BKM lalu diajukan

ke koordinator kota Surabaya (Koorkot Surabaya).<sup>40</sup> Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Ibu Ana Sekretaris pada tanggal 23 Maret 2008

**RESUME PROPOSAL LAYAK  
PENCARIAN DANA BLM P2KP<sup>41</sup>**

Nama BKM : Kedung Turi Sejahtera  
 Kelurahan : Kedung Turi  
 Kecamatan : Taman  
 Kota/ Kabupaten : Sidoarjo  
 SWK / KMW : Propinsi Jawa Timur

No	Nama KSM / Panitia	Alamat KSM	Jenis Usulan Kegiatan	Nilai Usulan Kegiatan (Rp.)	Sumber Pendapatan		
					BLM P2KP (Rp.)	Swadaya (Rp.)	APBD / Lainnya (Rp.)
<b>A. Lingkungan / Fisik</b>							
1	Panitia/KSM Duku	RW 06	Perbaikan Jalan	3.500.000	2.500.000	1.000.000	
2	Panitia/KSM Durian	RW 02	Perbaikan MCK Umum	1.400.000	1.000.000	400.000	
3	Panitia/KSM Pisang	RW 05	Pengadaan Tempat Sampah	7.900.000	5.900.000	2.000.000	
4	Panitia/KSM Jeruk	RW 09	Pelatihan Ketrampilan Kerja	19.500.000	13.600.000	5.900.000	
5	Panitia/KSM Nanas	RW 08	Bantuan Alat Kerja	20.600.000	15.600.000	5.000.000	
6	Panitia/KSM Mangga	RW 04	Santunan KK Miskin	15.200.000	11.700.000	3.500.000	
7	Panitia/KSM Manggis	RW 03	Santunan Lansia	6.900.000	5.200.000	1.700.000	
8	Panitia/KSM Apel	RW 01	Santunan Polio	4.000.000	3.000.000	1.000.000	
Sub Total				79.000.000	58.500.000	20.500.000	0
BOP BKM				0	1.500.000	0	0
Total				78.500.000	60.000.000	20.500.000	0

Program Atau Kegiatan Yang Dilarang Dibiayai Oleh Dana P2KP

<sup>41</sup> Dokumen Pencairan Dana BLM PNPM – P2KP 2007, hal. 17

1. Membangun gedung kantor pemerintahan atau kantor P2KP
2. Pembangunan rumah ibadah
3. Pembebasan lahan
4. Kegiatan yang berkaitan dengan politik praktis (kampanye, demonstrasi, sumbangan politik).
5. Kegiatan Militer atau semi Militer (pembelian atau perdagangan senjata dan sejenisnya).
6. Kegiatan-kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan (seperti pestisida, tembakau, limbah berbahaya, kegiatan diarea yang dilindungi) penduduk asli dan kelestarian bahaya lokal.
7. Deposito atau yang berkaitan dengan memupuk bunga Bank.
8. Kegiatan yang memanfaatkan BLM sebagai jaminan atau agunan atau garansi baik yang berhubungan dengan lembaga keuangan dan perbankan atau pihak ketiga lainnya.
9. Kegiatan yang bertentangan dengan hukum, nilai agama, tata susila, dan kemanusiaan, serta tidak sejalan dengan visi dan misi, tujuan dan nilai-nilai P2KP.

Bentuk Perjanjiannya Adalah:

Community Contracting adalah salah satu bentuk kesepakatan perjanjian antara BKM dengan KSM mengenai serah terima pekerjaan dan BLM dengan menggunakan akad hibah.

Hal-hal yang diatur dalam perjanjian ini antara lain:

1. Hal-hal yang terkait dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan yaitu: lingkup kegiatan, dokumen perjanjian kerja, jangka waktu pelaksanaan serta nilai perjanjian kerja.
2. Hal-hal khusus yang masuk dalam perjanjian seperti hak dan kewajiban pelaksana perjanjian, terhadap pencairan dana, penyelesaian pekerjaan dan pemeliharaan hasil pekerjaan.

Sedangkan hal-hal yang diatur dalam perjanjian untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang timbul selama pelaksanaan pekerjaan seperti sanksi force majeure dan penyelesaian pekerjaan persyaratan pengajuan dana.

1. Pembentukan BKM yang terdiri dari sedikinya 3 (tiga) orang per RW , dengan proposi keseluruhan yang tinggi dari unsure warga miskin dan perempuan.
2. Penyusunan perencanaan partisipatif perencanaan jangka menengah (PJM pronangkis) program penanggulangan kemiskinan oleh BKM yang memuat permasalahan yang ada di Desa Kedungturi.
3. mendapat pengesahan dari kepala Desa Kedungturi .

Dapat dilihat dalam akhir kegiatan pembentukan BKM dalam lampiran

Setiap KSM atau panitia yang mengajukan proposal harus melampirkan penilaian daftar kegiatan terlarang (negatif lists) yaitu daftar kegiatan yang dilarang dibiayai oleh dana P2KP. Jika ada salah satu kegiatan termasuk ke dalam daftar (negatif list) maka (akad) atau perjanjiannya akan tetapi jika tidak

termasuk ke dalam daftar (negatif list) maka akad atau perjanjiannya tidak batal dan dapat dilaksanakan kegiatan.

Kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh KSM atau panitia di desa Kedungturi semuanya telah melampirkan daftar (negatif list) dan semua programnya tidak termasuk kedalam daftar tersebut maka perjanjian atau akad sesuai dengan apa yang disyaratkan.